PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja berdasarkan capaian target:

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan Jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Dinas Kesehatan :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Capaian		
				Bertambah	Berkurang	Capaian (%)
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	• Produksi Padi (Ton)	77.109	90.052	12.943	0	16,79
	• Produksi Jagung (Ton)	7.317	13.950	6.633	0	90,65
	• Produksi Kedelai (Ton)	1.044	1.356	312	0	29,89
	• Produksi benih padi (Ton)	400	312	0	88	22,00
	• Produksi semangka (Ton)	1.613	5.017	3.404	0	211,04
	• Produksi Nanas (Ton)	200	65,9	0	134,1	67,05
Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	• Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,09	4,62	0,5	0	12,96
	• Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	5,42	6,08	0,7	0	12,18
	• Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,5	1,9	0,40	0	26,67
	• Produktifitas Semangka (Ton/Hektar)	5,33	5,33	0,0	0	0,00
	• Produktifitas Nenas (Kwintal/rumpun)	0,03	0,035	0,005	0	14,28

2. Bappeda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif dan inovatif	Persentase keselarasan perencanaan	75%	91%	121.3
	Persentase keterukuran perencanaan	70%	87%	124.3
	Persentase konsistensi perencanaan	65%	92%	141.5
	Persentase partisipatif dalam perencanaan	85%	70%	82
	Persentase inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	60%	67%	111.7
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi, Sosial Budaya dan Infrastruktur wilayah	21%	9%	42.9
Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian sasaran kinerja	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%	91%	100
	Persentase tingkat pengukuran kinerja	78%	87%	111.5
	Persentase tingkat pelaporan kinerja	94%	83%	88.3
Tersedianya Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	85%	100%	117.6
Meningkatnya aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60%	100%	166.7

3. Badan Kepegawaian Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tersedianya aparatur memiliki kompetensi dan profesional dalam tugas	Jumlah aparatur yang menjadi diklat kepemimpinan dan prajabatan	***5 orang***	***3 orang***	***60%***
	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ijin belajar	***15 orang***	***20 0rang***	***133%***
	Jenis Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Rakor yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi bidang teknis fungsional dan keahlian	***2 Jenis***	***2 Jenis***	***100%***
Terwujudnya pelayanan aministrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, disiplin aparatur, perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	***90%***	***96,92%***	***108%***
	Persentase terlaksananya sarana da prasarana kerja	***85%***	***99,87%***	***110%***
	Persentase terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	***84%***	***97,47%***	***116%***
	Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan	***3 dok***	***3 dok***	***100%***
	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	***90%***	***97,32%***	***108%***
	Persentase tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	***96%***	***100%***	***100%***
Tersedianya aparatur pemerintah	*Jabatan diisi oleh aparatur*			

	Persentase terprosesnya kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	*93 %*	*98,39%*	*106%*
	Jumlah terselesainya status hukum aparatur	*5 0rg*	*19 org*	*120%*
	Jumlah terbitnya kartu tanda pengenal (ID Card)	*1000 kartu*	*1000 Kartu*	*100%*
Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	*Pemberian TKD sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil – terpencil – tidak terpencil)*	*1 peraturan Melalui SK Bupati atau Perda*	*1 Peraturan Melalui SK Bupati atau Perda*	*100%*
	Terpenuhinya Pengetahuan PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang memasuki masa pensiun untuk kewirausahaan	*90%*	*100%*	*110%*
	Persentase Jumlah ASN tersandung masalah hukum yang mendapatkan bantuan hukum	*100%*	*100%*	*100%*
	Keikutsertaan dalam cabang MTQ ASN Tingkat Propinsi	-	-	-
	Keikut Sertaan dalam cabang MTQ ASN Tingkat Propinsi	-	-	-
Tersedianya database kepegawaian yang up to date	*Jumlah data ASN yang akurat terkini*	*4.515 org*	*4.039 org*	*89%*
Tersedianya SDM Pengelola Simpeg yang berkompeten	*Jumlah Aparatur Pengelola yang berkompeten*	-	-	-
Terciptanya Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	*Jumlah aparatur*	*1 Aplikasi*	*1 Aplikasi*	*100%*

4. Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN					
			2012	2013	2014	2015	2016	%
1	Kawasan Ekonomi Strategis	Program Pengembangan Budidaya Air Laut, Payau dan Air Tawar	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0,0
2.	Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bantuan Pompong dan Alat Tangkapnya	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	480 Unit	725 Unit	556 Unit (17+539)	218 Unit (160 +58)	113 Unit (60 +53)	297,37
3.	Peningkatan Hasil Perikanan Laut	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	29.025 Ton	32.400 Ton	25.824,3 Ton	25.792,20 Ton	23.491,54 Ton	63,28
4.	Peningkatan Hasil Perikanan Umum/ Kolam	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	702 Ton.	760 Ton.	986,6 Ton	1.154,60 Ton	1202,90 Ton	13,36
5.	Adanya Akses Pemasaran/ Peluang Pasar Hasil olah perikanan	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	260 Ton	300 Ton	361 Ton	809 Ton	993,73 Ton	198,75
6.	Jalanya Zonasi	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan lainnya	1 Paket Realisasi.	1 Paket Realisasi.	1 Paket Realisasi	-	-	-

Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	• Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,10	4,62	109,75
	• Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	6,42	6,08	94,47
	• Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,37	1,9	100,7
	• Produktifitas Semangka (Ton/Hektar)	8,25	5,33	64,61
	• Produktifitas Nenas (Kwintal/rumpun)	0,035	0,04	114,28
Meningkatnya prasarana pengolahan jalan usahatani	• Tersedianya prasarana pengolahan jalan usaha tani (Km)	3,5	3,85	110

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu

peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Masa Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, 21 Maret 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

H. ROMI HARIYANTO, SE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iv

I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. KELEMBAGAAN 15

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 23

D. ISSU-ISSU STARTEGIS..... 26

E. MAKSUD DAN TUJUAN..... 28

F. LANDASAN PENYUSUNAN..... 28

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2016..... 29

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32

A. VISI DAN MISI 34

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 35

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 37

D. PERJANJIAN KINERJA..... 49

III. AKUNTABILITAS KINERJA 54

A. INDIKATOR KINERJA 54

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA 55

C. KINERJA KEUANGAN 70

IV. PENUTUP 74

A. SIMPULAN..... 74

B. SARAN..... 75

V. LAMPIRAN

LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN III. PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

LAMPIRAN V. DOKUMEN ADMINISTRASI REVIU LKJ KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 merupakan LKJ transisi memasuki tahun pertama dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. LKJ Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja *(Performance Results)* selama tahun 2016 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja *(Performance Plan)* Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 yang mengacu kepada RPJM Tahun 2016-2021 dan APBD Tahun 2016.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 menetapkan .... program dan ..... kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 5 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 masuk kedalam kategori sangat berhasil yakni 104,19 % lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MISI KABUPATEN	RATA-RATA CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)
		2016
1	MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	100,36
2	MISI 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)	117,81
3	MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK	99,90
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF	100,00
5	MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS	102,87
RATA-RATA		104,19

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi

adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*,

sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.

5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayagunakan.

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya "*good governance*" pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya "*good governance*". Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuiakan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km^2 dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha,sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km2 dan lautan/perairan seluas 3.560 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km2 yang

terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478.17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	**20**	**73**	**5.445,00**	**100,00**

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2014

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya

ditandai dengaan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 bertambah sebanyak 1.586 jiwa dari 212.084 jiwa pada tahun 2014 menjadi 213.670 jiwa pada tahun 2015 atau dengan pertumbuhan 0,74 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2015 sebesar 39,24 jiwa/km^2 dan sex ratio 105,55.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	2014					2015*				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Mendahara	13.252	12.700	25.952	104	35,12	13.306	12.747	26.053	104	28,59
2	Mendahara Ulu	8.747	7.708	16.455	113	42,40	9.001	7.932	16.933	113	44,41
3	Geragai	11.840	10.371	22.211	114	50,83	11.965	10.483	22.448	114	78,67
4	Dendang	7.627	7.344	14.971	104	55,10	7.641	7.354	14.995	104	31,32

5	Muara Sabak Barat	8.535	8.064	16.599	106	60,25	8.682	8.204	16.886	106	67,07
6	Muara Sabak Timur	15.672	15.476	31.148	101	53,39	15.710	15.507	31.217	101	76,09
7	Kuala Jambi	7.268	7.063	14.331	103	127,95	7.314	7.103	14.417	103	119,62
8	Rantau Rasau	11.741	11.182	22.923	105	73,71	11.857	11.287	23.144	105	64,99
9	Berbak	5.051	4.810	9.861	106	119,00	5.061	4.817	9.878	105	50,80
10	Nipah Panjang	12.881	12.585	25.466	102	43,26	12.906	12.603	25.509	102	108,69
11	Sadu	6.262	5.905	12.167	106	6,88	6.275	5.915	12.190	106	6,69
Jumlah		**108.924**	**103.208**	**212.084**	**105**	**39,23**	**109.718**	**103.952**	**213.670**	**106**	**39,24**

**) Angka sementara*
Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mencapai 1,87 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan sebesar 13,43 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan yang negatif pada Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai kontribusi sebesar 52,59 persen berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Timur. Jika tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian, pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 6,56 persen.

Gambar 1.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2011-2015

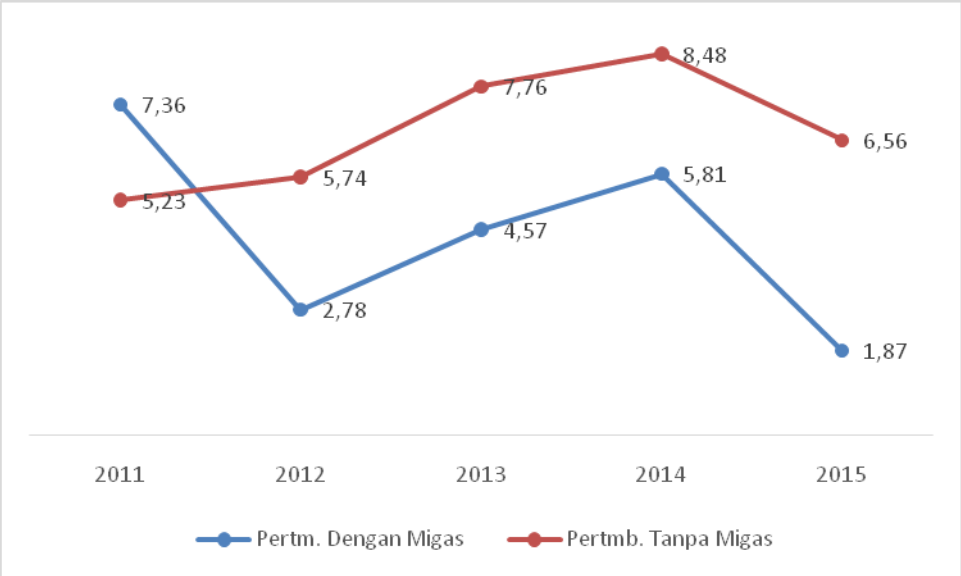

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,11 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 9,39 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,09 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,83 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 6,78 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,62 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,02 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,53 persen, kategori Real Estate sebesar 4,17 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,62 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,23 persen, kategori industri Pengolahan sebesar 2,68 persen, serta kategori Konstruksi sebesar 2,66 persen.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,21	4,52	5,14	9,67	5,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,60	0,21	2,42	5,35	(0,42)
3.	Industri Pengolahan	5,49	18,09	10,90	(0,70)	2,68
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	11,53	13,77	6,43	7,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,13	1,28	0,25	2,85	4,53
6.	Konstruksi	5,03	10,37	24,09	4,40	2,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	7,84	10,18	11,56	13,11
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,13	5,82	8,84	7,83	3,62
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,59	6,33	7,50	16,19	9,57
10.	Informasi dan Komunikasi	7,41	5,08	5,57	10,46	6,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,01	10,44	9,95	5,93	3,23
12.	Real Estate	6,58	4,54	5,45	1,70	4,17
13.	Jasa Perusahaan	2,97	3,61	1,66	5,38	6,83
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	2,59	3,21	12,29	9,39
15.	Jasa Pendidikan	3,21	3,21	3,97	2,46	5,02
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,00	4,04	9,24	15,26	13,43
17.	Jasa lainnya	3,17	3,18	4,67	5,45	6,78
	Laju Pertumbuhan	**7,36**	**2,78**	**4,57**	**5,81**	**1,87**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi .

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. PDRB Kabupaten Tanjung

Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2015 dengan migas yaitu sebesar Rp 17.786.297,57 juta dan tanpa migas sebesar Rp 7.269.765,94 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 15.840.297,64 juta dan tanpa migas sebesar Rp 5.185.197,11 juta.

Gambar 1.2.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas
Tahun 2011-2015

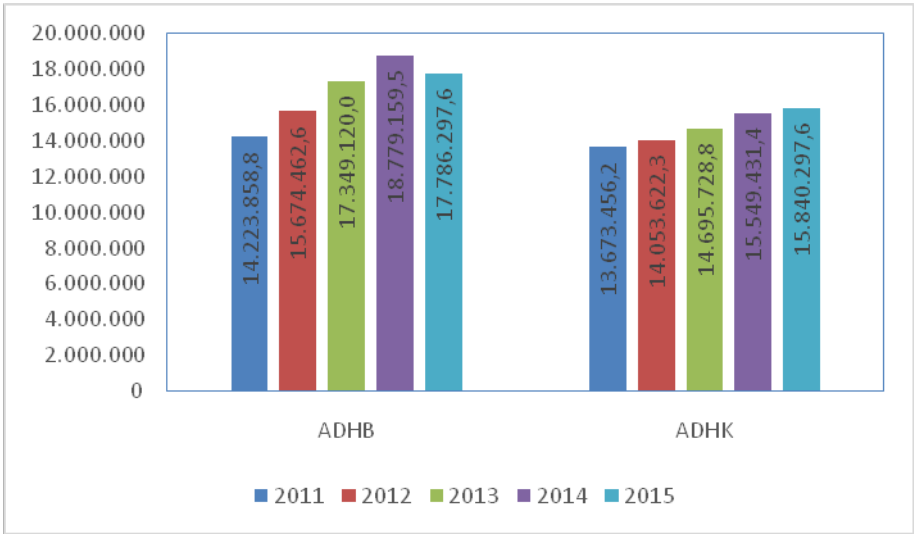

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.3.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas
Tahun 2011-2015

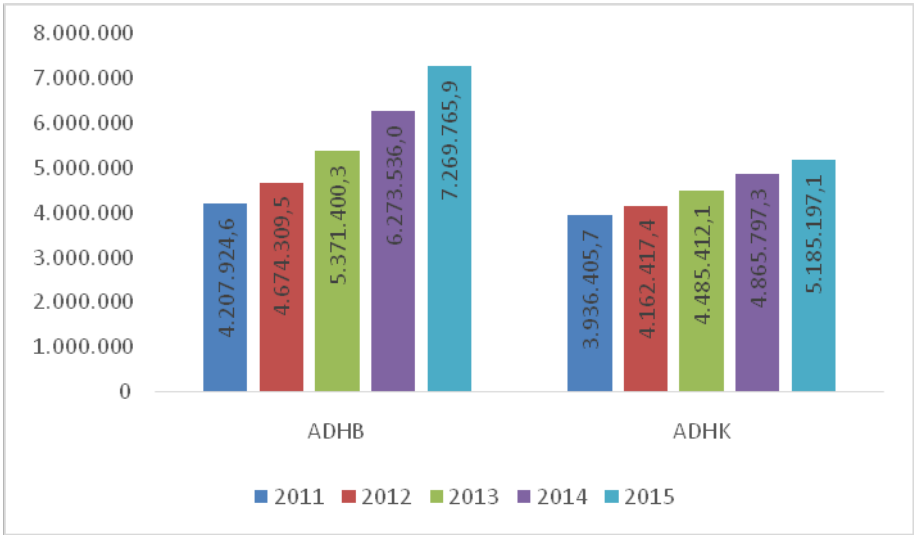

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

5. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 struktur ekonomi masih berbasis pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencatat sebesar 52,59 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,13 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 8,12 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,86 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,03 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 1.4.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015

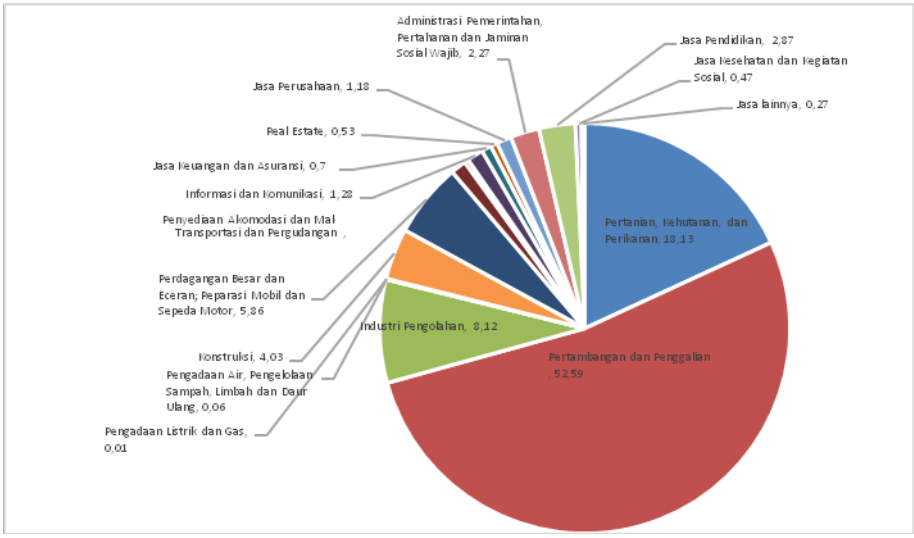

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

6. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015. PDRB Perkapita ADHB mengalami penurunan. Selanjutnya PDRB Perkapita ADHK periode 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 83.241.904 pertahun atau sebesar Rp. 6.936.825 perbulan mengalami penurunan sebesar *minus* 5,99 persen dari tahun 2014. Sementara PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2015 Rp. 74.134.402 pertahun atau Rp. 6.177.867 perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 1,87 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 1.5.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015

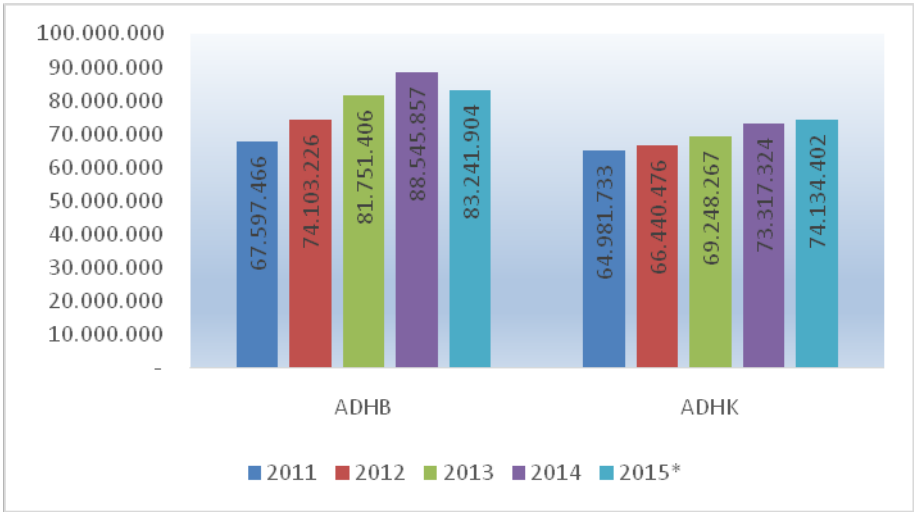

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.6.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015 (persen)

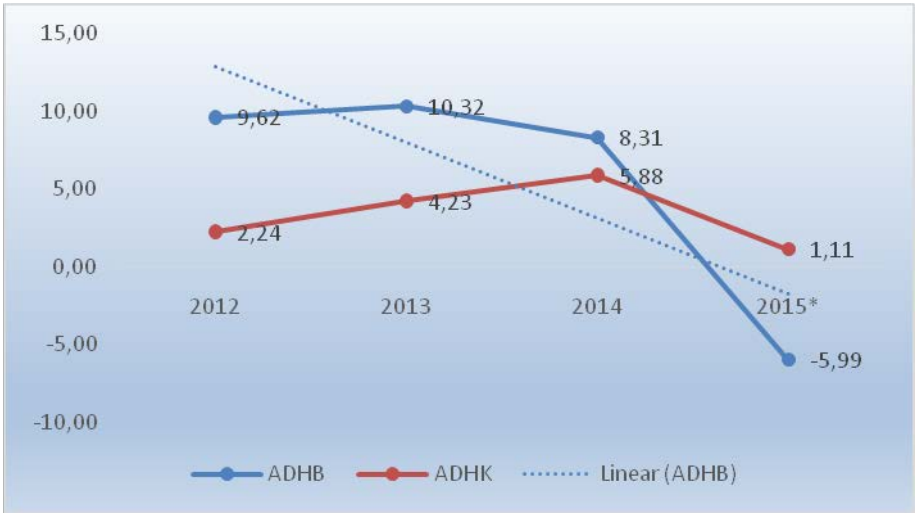

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

7. Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan. Tingkat inflasi Kota Jambi dari tahun 2010-2015 adalah

berfluktuasi dengan rata-rata 6,06 persen per tahun. Pada tahun 2010, tingkat inflasi Kota Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 10,52 persen, tetapi pada tahun 2011 tingkat inflasi menurun signifikan menjadi 2,76 persen atau menurun sebesar 73,76 persen, namun tahun 2012 inflasi naik kembali menjadi 4,22 persen atau tumbuh 52,90 persen, kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,74 persen. Selanjutnya pada tahun 2014, tingkat inflasi Kota Jambi menurun sedikit menjadi sebesar 8,72 persen dan turun signifikan kembali pada tahun 2015 menjadi 1,37 akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga.

Gambar 1.7.

Tingkat Inflasi Kota Jambi Tahun 2011-2015

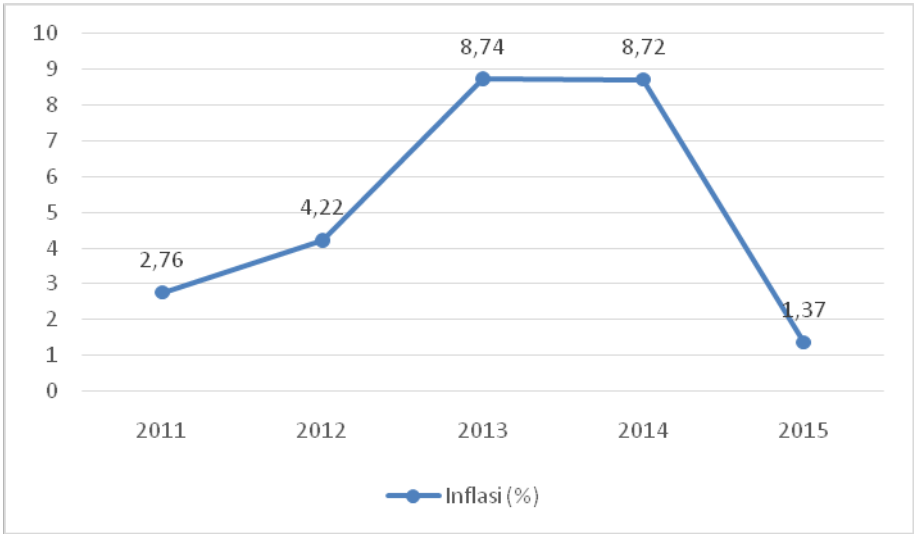

Sumber : BPS, 2016

8. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang Pluktuatif

cenderung menurun. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini pada tahun 2011 sebesar 0.28 menurun menjadi 0.27 pada tahun 2015. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak dari posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna. Grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 1.8.

Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015

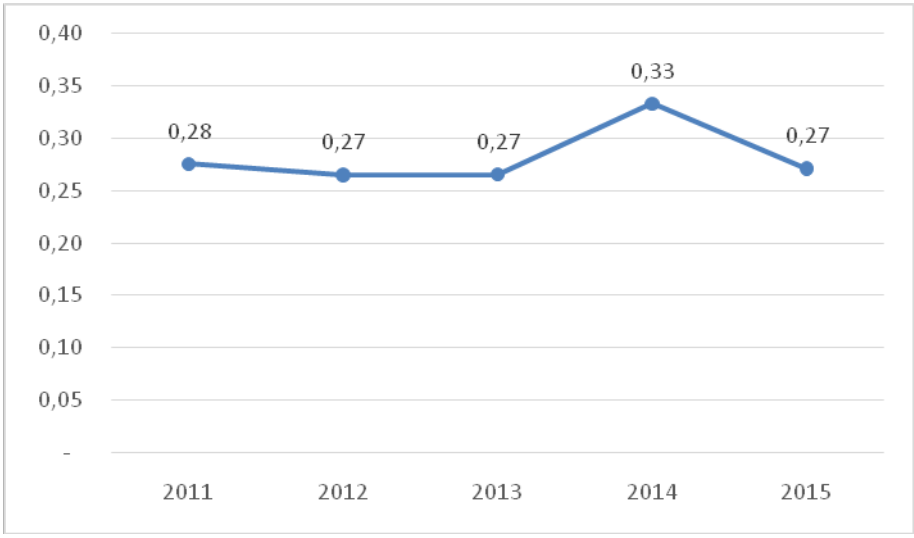

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur Kaya Fungsi*", maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip "*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*".

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang

sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat; ▪ Dinas; ▪ Badan; ▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota) ▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan : ❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi) ❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH ❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat. ❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung.	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat ▪ Lemtekda. ▪ Kecamatan (khsusus kab/kota) ❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.
MATERI	**PP No 18 Tahun 2014**	**PP No 41 Tahun 2007**
TIPOLOGI	❖ Jumlah perangkat Derah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang. ❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpkkan menjadi : ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A. ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah	❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan. ❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.

	tipe B ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	
PEMETAAN URUSAN	❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung. ❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung. ❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH	❖ Jumlah perangkat Derah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah. ❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4. ❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan. ❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan. ❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur

mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustaakan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
    3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
    4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
   2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
   3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
   4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:
   a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
   b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
   c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
   d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
   e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
   f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
   g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
   h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
   i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
   j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
   k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

a. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
b. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
c. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
d. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
e. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.
f. masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

a. Jumlah persentase Penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
b. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas.
c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petuni (NTP) masih rendah.
e. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
f. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.
g. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
h. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.

i. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
j. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah.
k. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
l. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.
b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM Tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
c. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik.
d. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
e. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.
f. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskemas pembantu belum berkualitas.
g. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.
h. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
i. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.
j. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.
k. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

a. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.
b. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
c. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.
d. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.
e. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah masih rendah.
b. Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum optimal.
c. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan.
d. Belum optimalnya peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati peraturan daerah.
f. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.
g. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena potensi belum optimal digunakan.
h. Pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
i. Masih terbatasnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.
j. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan capaian opini laporan keuangan daerah belum optimal.

D. ISSU-ISSU STRATEGIS

1. Issu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.

b) Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu diseseuaikan dengan daya dukung lingkungan.

2. Issu Strategis Perekonomian Daerah

a) Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.

b) Keberadaan UMKM dan Koperasi belum dapat berperan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat.

c) Potensi Pariwisata Daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

3. Issu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

a) Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .

c) peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.

d) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing.

4. Issu-issu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

a) Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.

b) Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik Masih rendah sehingga perlu peningkatan pendidikan politik masyarakat.

c) Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

5. Isu-issu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
2. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

6. Isu-issu strategis Global, Nasional dan Regional

a) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia

c) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d) Masih terdapat konflik sengketa lahan antara Penyelesaian Batas Kabupaten dan batas Desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuakn dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021.
k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2015 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsidi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2015 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016

dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021 dan Rencana Kinerja 2016. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2016.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)"**. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

3. Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;

3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan;
4. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat;
5. Meningkatkan daya saing Produksi perikanan;
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah;
7. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara;
8. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing;
9. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas;
10. Meningkatkan sarana pendidikan dasar;
11. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;

13. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi;
15. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya;
16. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
17. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat;
18. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
19. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa;
20. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis;
21. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;
8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;
9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;

15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;
31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

a) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas;
b) Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;
c) Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
d) Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
e) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
f) peningkatan produksi tanaman padi;
g) peningkatan produksi tanaman palawija;
h) peningkatan produksi tanaman buah-buahan;
i) Peningkatan Populasi Ternak;
j) Peningkatan produksi daging;
k) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
l) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
m) Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut);
n) Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
o) Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh SKIM pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas;
p) Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing;
q) Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa;
r) Pengembangan kawasan situs cagar budaya;
s) Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
t) Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata;

u) Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
v) Peningkatan mutu pendidikan dasar;
w) Peningkatan sarana pendidikan dasar;
x) Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat;
y) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
z) Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat;
aa) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
bb) Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat;
cc) Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
dd) Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
ee) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;
ff) Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK;
gg) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;
hh) Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan;
ii) Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya;
jj) Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
kk) Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran;
ll) Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan;
mm) Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda;
nn) Peningkatan kemampuan kafilah;
oo) Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas
pp) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance);
qq) Peningkatan manejemen pemerintahan desa;

rr) Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;

ss) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;

tt) Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah :

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.

c) Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 – 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1) Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru;
2) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
3) Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung;
4) Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik;
5) Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik;
6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang;
7) Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh;
8) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
9) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi;
10) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija;
11) Mengembangkan komoditas buah-buahan;
12) Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak;
13) Meningkatkan produksi daging;
14) Meningkatkan Pendapatan Petani;
15) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan;
16) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut;
17) Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan;
18) Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat;
19) Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM;
20) Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin;

21) Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
22) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar;
23) Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya;
24) Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
25) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata;
26) Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi;
27) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
28) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
29) Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup;
30) Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas);
31) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas;
32) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama;
33) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan;
34) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
35) Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
36) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB;
37) Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak;
38) Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan;
39) Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
40) Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi;
41) Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni;

42) Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
43) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
44) Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
45) Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah;
46) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah;
47) Meningkatkan TC MTQ;
48) Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia;
49) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
50) Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
51) Melaksanakan pemilihan kepala desa;
52) Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu;
53) Meningkatkan capaian penilaian SAKIP;
54) Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah;
55) Peningkatan tindaklajut temuan;
56) Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
57) Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI I "Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan"			
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas	Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru
			Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
			Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik
			Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang
	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air
MISI II "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)"			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi	peningkatan produksi tanaman padi	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi
	Meningkatnya produksi tanaman palawija	peningkatan produksi tanaman palawija	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija
	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	peningkatan produksi tanaman buah-buahan	Mengembangkan komoditas buah-buahan
	Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Ternak	Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya produksi daging	Peningkatan produksi daging	Meningkatkan produksi daging
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Pendapatan Petani
Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan
Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut)	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut
	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan
			Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat
Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh Skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas	Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM
			Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin
		Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah
		Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Pengembangan kawasan situs cagar budaya	Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya
		Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan
		Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata
Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi,	Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Nasional dan Internasional	
MISI III "Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK"			
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Peningkatan sarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)
		Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan
		Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
		Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB
Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kemasyarakatan			
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK	Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan
		Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja
MISI IV "Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif"			
Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan	Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya	Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni
Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
			Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah
		Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda	Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah
		Peningkatan kemampuan kafilah	Meningkatkan TC MTQ
			Peningkatan kemampuan anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sholeh Indonesia
Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas
MISI V "Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis"			
Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance)	Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Peningkatan manejemen pemerintahan desa	Melaksanakan pemilihan kepala desa
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP
			Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
			Peningkatan tindaklajut temuan
			Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa
		Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.130.270.040,777,67 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 492.372.303.560,67 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 637.897.737.217,00.

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76,75%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23,43%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,79%

3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,15%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9,09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%
		Persentase kecelakaan darat	0,13%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4,10 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6,42 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8,25 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.733.404 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219.716 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.5
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%

		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33,9 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2,01%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97,09%
		APM SMP /Sederajat	84,24%
		APK SD /Sederajat	112,89%
		APK SMP /Sederajat	92,28%
		Angka Melek Huruf	97,32%
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th
		Harapan Lama Sekolah	11,30 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89,23%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96,63%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65,45 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,00/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22,87/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,76%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76,5%

		Prevalensi Penyakit Kusta	3,5 /1000
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20,0%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11,76%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%
		Indeks Pembangunan Gender	59,81
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88,85
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%

5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47,95%
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30.000
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk

indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2016 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

	MISI 1 : *MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*

Untuk mencapai Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 5 (lima) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
2) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan.
3) Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten.
4) Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk.
5) Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76,75%	85,27%	111,10
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23,43%	23,43%	100

	konektivitas				
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,79%	61,55%	92,15
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	100
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,15%	5,15%	100
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9,09%	9,09%	100
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%	40%	100
		Persentase kecelakaan darat	0,13%	0,13%	100
		Persentase kecelakaan air	0%	0%	100

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5 sasaran yang didukung dengan 9 Indikator Kinerja Utama.

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 sebesar 100,36 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarakan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini.

	MISI 2 : ***MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)***

Untuk mencapai Misi 2 ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Investasi Industri, Kepariwisataan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim)"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 11 (sebelas) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya produksi tanaman padi.
2) Meningkatnya produksi tanaman palawija.
3) Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan.
4) Meningkatnya Populasi Ternak.
5) Meningkatnya produksi daging.
6) Meningkatnya pendapatan petani.
7) Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat.
8) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.
9) Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan.
10) Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM serta Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing.
11) Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4,10 Ton/Ha	4,56 Ton/Ha	111,22
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6,42 Ton/Ha	9,54 Ton/Ha	148,60
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8,25 Ton/Ha	20,9 Ton/Ha	253,33
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.733.404 ekor	3.833.404 ekor	102,68
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219.716 Kg	219.916 Kg	100,09
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97,55	98,6	101,08
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,5%	93,0%	115,53
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn	nn	100,00
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)	100,00
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%	0%	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%	0%	100,00
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%	0%	100,00
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33,9 Kg/Kapita	35,0 Kg/Kapita	103,24
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM	608 IKM	100,00
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2,01%	3%	149,15
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	100,00

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 11 sasaran dan 16 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 sebesar 117,81 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan

maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100%.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pertanian ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Minat petani akan budidaya tanaman tersebut semakin meningkat karena harga komoditi tanaman jagung dan kedelai dipasaran tinggi.
2. Perubahan varietas benih jagung yang disesuaikan dengan spesifik lokasi sehingga hasil ubinan akhir dapat lebih tinggi dibanding varietas yang sebelumnya ditanam yaitu : Varietas SHS.4 menjadi Varietas Bisi.2
3. Dukungan program pengembangan jagung hybrida dan kedelai meningkat baik kualitas maupun kuantitas, baik dari dana APBD maupun APBN.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan Jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Capaian		
				Bertambah	Berkurang	Capaian (%)
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	• Produksi Padi (Ton)	77.109	90.052	12.943	0	16,79
	• Produksi Jagung (Ton)	7.317	13.950	6.633	0	90,65
	• Produksi Kedelai (Ton)	1.044	1.356	312	0	29,89
	• Produksi benih padi (Ton)	400	312	0	88	22,00
	• Produksi semangka (Ton)	1.613	5.017	3.404	0	211,04
	• Produksi Nanas (Ton)	200	65,9	0	134,1	67,05
Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	• Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,09	4,62	0,5	0	12,96
	• Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	5,42	6,08	0,7	0	12,18
	• Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,5	1,9	0,40	0	26,67
	• Produktifitas Semangka (Ton/Hektar)	5,33	5,33	0,0	0	0,00
	• Produktifitas Nenas (Kwintal/rumpun)	0,03	0,035	0,005	0	14,28
Meningkatnya prasarana pengolahan jalan usahatani	• Tersedianya prasarana pengolahan jalan usaha tani (Km)	4	3,85	0	0,15	3,75

	MISI 3 : ***MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK***

Untuk mencapai Misi 3 ***"Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan Iptek"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 7 (sebelas) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2) Meningkatnya sarana pendidikan dasar.
3) Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
4) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
5) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah.
6) Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.
7) Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97,09%	97,09%	100,00
		APM SMP /Sederajat	84,24%	84,24%	100,00
		APK SD /Sederajat	112,89%	112,89%	100,00
		APK SMP /Sederajat	92,28%	92,28%	100,00

		Angka Melek Huruf	97,32%	97,32%	100,00
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th	6 Th	100,00
		Harapan Lama Sekolah	11,30 Th	11,30 Th	100,00
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89,23%	89,23%	100,00
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96,63%	96,63%	100,00
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65,45 Th	65,43 Th	99,97
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,00/1.000 KH	21,00/1.000 KH	95,45
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22,87/1.000 KH	21,55/1.000 KH	94,23
		Jumlah Kematian Ibu	5	8	62,5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,76%	0,46%	165,22
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76,5%	76,5%	100,00
		Prevalensi Penyakit Kusta	3,5 /1000	3,0 /1000	85,71
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7	6	85,71
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%	28%	78,66
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20,0%	26,0%	130,00
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11,76%	11,76%	100,00
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78%	0,78%	100,00
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%	35%	100,00

		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%	35%	100,00
		Indeks Pembangunan Gender	59,81	59,81	100,00
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%	70%	100,00
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%	75%	100,00

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 7 sasaran dan 26 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 hampir sempurna sebesar 100 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 99,90 % atau hampir mencapai 100 % meskipun pada indikator jumlah kematian ibu masih tinggi sehingga realiasi dari target tahun 2016 hanya sebesar 62,5 % namun secara rata-rata tetap masuk dalam katergori baik.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang kesehatan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita pada tahun 2016 sebesar 0,46% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,82% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dan tahun 2014 sebesar 0,9 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tercapainya angka ini karena dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat tentang makanan tambahan yang bergizi untuk balita dan adanya sweeping terhadap anak balita sehingga kondisinya dapat terpantau setiap bulan. Bila dibandingkan dengan angka nasional (13,9%), angka ini sudah dibawah angka nasional.
2. Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita pada tahun 2016 sebesar 11%, angka ini sudah mencapai target (13%). Dengan capaian kinerja sebesar 118,2%. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,2%. tercapainya capaian ini karena dilakukannya penimbangan balita

setiap bulan di posyandu dan diberikannya makanan tambahan pada anak balita.

3. Prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita pada tahun 2016 sebesar 28%, angka ini sudah mencapai target (37%) dengan capaian kinerjanya sudah mencapai 132,1%. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 37,9%.

   Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung sasaran tersebut adalah :

(1) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

(2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin.

Dana yang ditargetkan untuk menyelesaikan sasaran ini sebesar Rp. 203.696.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 193.595.100,- atau 95,04%.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan dan tumbuh kembang serta manfaat makanan bergizi bagi keluarganya, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kesehatan tahun 2017 tetap akan melaksanakan kegiatan :

(1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin

(2) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

Namun mengingat kondisi dana yang tersedia sehingga hanya 2 kegiatan yang dapat dilaksanakan.

1) Sasaran menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Cakupan penemuan dan penanganan TB paru BTA +	%	76.5	100	100.0
2	Prevalensi penyakit kusta per 100 pddk	%	3.5	0.88	100.0
3	Cakupan desa/Kel. UCI	%	95.8	95.8	100.0
4	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	24.2	13.37	100.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator kinerja yang ada, ke 3 indikator telah mencapai target (≥ 100%).

Pada sasaran ini dapat dijabarkan indikator pencapaian sasaran yaitu :

1. Persentase rumah tangga PHBS pada tahun 2016 sebesar 55,73%, angka ini sudah mencapai target (52%) dengan capaian kinerja sebesar 107,2%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 52,04% dengan capaian kinerja sebesar 86,7%. Angka ini meningkat disebabkan karena telah dilakukan penilaian kepada masyarakat tentang prilaku hidup bersih sehat dilingkungan rumah dan ditatanan sekolah, maka harus dilakukan terus penyuluhan PHBS ditatanan sekolah dan rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan angka nasional (56,58%), angka ini masih dibawah angka nasional.
2. Persentase rumah tangga dengan layanan air bersih tahun 2016 sebesar 61,12%, Angka ini sudah mencapai target (53%) dengan capaian angka
   kinerja 115,3%. Bila dibandingka angka tahun 2015 dan tahun 2014 angka ini meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 60% dan tahun 2014 sebesar 56,25% dengan capaian kinerja sebesar 97,8%. meskipun telah mencapai target tetapi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sebagian menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih. Jika dibandingkan capaian nasional (68,11%), angka ini masih dibawah angka nasional.
3. Cakupan desa terhadap sanitasi layak pada tahun 2016 sebesar 36%. Angka ini mencapai target (26%) dan dengan capaian kinerja sebesar 138,5%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2014, yaitu tahun 2015 sebesar 33,33% dengan capaian kinerja sebesar 60,6% dan tahun 2014 hanya sebesar 24,37% dengan capaian kinerja sebesar 55,0%. Angka ini meningkat karena telah dilakukan sosialisasi desa tentang sanitasi, dan telah dilakukan pemicuan STBM di beberapa desa.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran adalah:

(1) Pengawasan kwalitas air minum.
(2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (P2WKSS)
(3) Pelatihan pengelola kesling puskesmas dan kesehatan kerja
(4) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
(5) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

(6) Pembinaan desa siaga.

(7) Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dana yang ditargetkan untuk menyelesaikan sasaran ini sebesar Rp. 335.562.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 327.271.500,- atau 97,52%.

MISI 4 : *MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF*

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

1) Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat.
2) Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat.
3) Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
4) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran.
5) Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat.
6) Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88,85	88,85	100,00
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-	-	100,00
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%	72%	100,00

4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%	80%	100,00
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4	4	100,00
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%	70%	100,00

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 6 sasaran dengan 6 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2016 maraih angka sebesar 100 %.

MISI 5 : ***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS***

Untuk mencapai Misi 5 ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis"*** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

1) Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik.
2) Meningkatnya manajemen pemerintahan desa.
3) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah.

4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100,00
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47,95%	47,95%	100,00
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30.000	30.000	100,00
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B	B	100,00
		Opini BPK	WDP	WDP	100,00
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%	92%	100,00
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi	Tinggi	100,00
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%	74%	122,97

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal capaian kinerja tahun 2016 pada Misi 5 mencapai 102,87 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangakan rata-rata capaian kinerja misi kelima tahun 2016 sebesar 102,87 % dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 122,97 % pada Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pemerintahan ini dikarenakan adanya goodwill dari kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur menjadi pelayan bagi masyarkatnya selaras dengan visi – misi Bupati "MERAKYAT"

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.130.270.040.777,67 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 atau terealisasi sebesar 94,15 %, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	39.167.861.222,26	43.935.738.483,85	112,17
2	Pendapatan Dana Perimbangan	946.571.991.750,00	968.373.794.264,00	102,30
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	85.364.344.823,25	78.961.797.201,00	92,50
	Total	**1.071.104.197.795,51**	**1.091.271.329.948,85**	**101,88**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

1	Pajak Daerah	12.759.204.791,61	12.399.377.006,85	97,18
2	Retribusi Daerah	6.398.921.758,00	4.368.648.180,25	68,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	4.800.000.000,00	4.960.217.704,08	103,34
4	Lain – Lain PAD yang sah	15.209.734.672,65	22.207.495.592,67	146,01
J u m l a h		**1.071.104.197.795,51**	**1.091.271.329.948,85**	**101,88**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 penerimaan yang ditargetkan sebesar 1.071.104.197.795,51 melebihi target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh seluruh pendapatan sebesar sebesar 1.091.271.329.948,85 atau 101,88 %. realisasi pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	117.920.891.750,00	169.194.985.646,00	143,48
2	Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	533.829.506.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	294.821.594.000,00	265.349.302.618,00	90,00
J u m l a h		**946.571.991.750,00**	**968.373.794.264,00**	**102,30**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2016 mencapai target pendapatan yang ditetapkan sebesar 946.571.991.750,00. Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi 968.373.794.264,00 atau 102,30%

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	0,00	577.353.500,00	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	36.286.508.706,00	30.086.019.701,00	82,91
3	Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus (DPDF)	49.077.836.117,25	48.298.424.000,00	98,41
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah		**85.364.344823.25**	**85.364.344823.25**	**100,00**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

1	Belanja Tidak Langsung	492.372.303.560,67	465.192.065.689,00	94,48
2	Belanja Langsung	637.897.737.217,00	598.912.818.124,00	93,89
	Total	**1.130.270.040.777,67**	**1.064.104.883.813,00**	**94,15**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2016 belanja tidak langsung hanya sebesar 94,48 % dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2016-2021 bahwa belanja tidak langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total realisasi belanja sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.130.270.040.777,67 atau terealisasi sebesar 94,15 %, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 465.192.065.689,00 atau 94,48 % dan belanja langsung sebesar Rp. 598.912.818.124,00 atau 93,89 %.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**61.665.842.982,16**	**61.665.842.982,16**
	- SiLPA	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
	- Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	0,00
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00
	- Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3	**Pembiayaan Netto**	**59.165.842.982,16**	**59.665.842.982,16**

** Data Sementara(unaudit)*
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2016, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 61.665.842.982,16 terealisasi sebesar Rp. 61.665.842.982,16 atau 100 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 100% sehingga pembiayaan netto tahun 2016 sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 59.165.842.982,16 terealisasi sebesar Rp. 59.665.842.982,16 atau 100,85 %.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2016 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H. ROMI HARIYANTO, SE.

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya "*good governance*" pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya "*good governance*". Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuiakan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km^2 dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha,sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km2 dan lautan/perairan seluas 3.560 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km2 yang

terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478.17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	**20**	**73**	**5.445,00**	**100,00**

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2014

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya

ditandai dengaan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 bertambah sebanyak 1.586 jiwa dari 212.084 jiwa pada tahun 2014 menjadi 213.670 jiwa pada tahun 2015 atau dengan pertumbuhan 0,74 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2015 sebesar 39,24 jiwa/km^2 dan sex ratio 105,55.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	2014					2015*				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Mendahara	13.252	12.700	25.952	104	35,12	13.306	12.747	26.053	104	28,59
2	Mendahara Ulu	8.747	7.708	16.455	113	42,40	9.001	7.932	16.933	113	44,41
3	Geragai	11.840	10.371	22.211	114	50,83	11.965	10.483	22.448	114	78,67
4	Dendang	7.627	7.344	14.971	104	55,10	7.641	7.354	14.995	104	31,32

5	Muara Sabak Barat	8.535	8.064	16.599	106	60,25	8.682	8.204	16.886	106	67,07
6	Muara Sabak Timur	15.672	15.476	31.148	101	53,39	15.710	15.507	31.217	101	76,09
7	Kuala Jambi	7.268	7.063	14.331	103	127,95	7.314	7.103	14.417	103	119,62
8	Rantau Rasau	11.741	11.182	22.923	105	73,71	11.857	11.287	23.144	105	64,99
9	Berbak	5.051	4.810	9.861	106	119,00	5.061	4.817	9.878	105	50,80
10	Nipah Panjang	12.881	12.585	25.466	102	43,26	12.906	12.603	25.509	102	108,69
11	Sadu	6.262	5.905	12.167	106	6,88	6.275	5.915	12.190	106	6,69
Jumlah		**108.924**	**103.208**	**212.084**	**105**	**39,23**	**109.718**	**103.952**	**213.670**	**106**	**39,24**

**) Angka sementara*
Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mencapai 1,87 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan sebesar 13,43 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan yang negatif pada Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai kontribusi sebesar 52,59 persen berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Timur. Jika tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian, pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 6,56 persen.

Gambar 1.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2011-2015

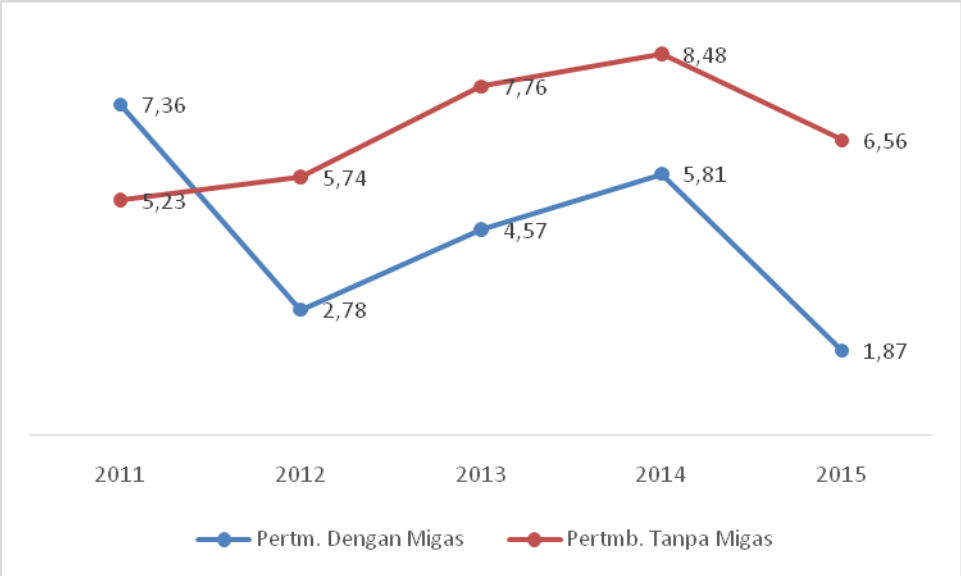

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,11 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 9,39 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,09 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,83 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 6,78 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,62 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,02 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,53 persen, kategori Real Estate sebesar 4,17 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,62 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,23 persen, kategori industri Pengolahan sebesar 2,68 persen, serta kategori Konstruksi sebesar 2,66 persen.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,21	4,52	5,14	9,67	5,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,60	0,21	2,42	5,35	(0,42)
3.	Industri Pengolahan	5,49	18,09	10,90	(0,70)	2,68
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	11,53	13,77	6,43	7,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,13	1,28	0,25	2,85	4,53
6.	Konstruksi	5,03	10,37	24,09	4,40	2,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	7,84	10,18	11,56	13,11
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,13	5,82	8,84	7,83	3,62
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,59	6,33	7,50	16,19	9,57
10.	Informasi dan Komunikasi	7,41	5,08	5,57	10,46	6,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,01	10,44	9,95	5,93	3,23
12.	Real Estate	6,58	4,54	5,45	1,70	4,17
13.	Jasa Perusahaan	2,97	3,61	1,66	5,38	6,83
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	2,59	3,21	12,29	9,39
15.	Jasa Pendidikan	3,21	3,21	3,97	2,46	5,02
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,00	4,04	9,24	15,26	13,43
17.	Jasa lainnya	3,17	3,18	4,67	5,45	6,78
	Laju Pertumbuhan	**7,36**	**2,78**	**4,57**	**5,81**	**1,87**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi .

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. PDRB Kabupaten Tanjung

Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2015 dengan migas yaitu sebesar Rp 17.786.297,57 juta dan tanpa migas sebesar Rp 7.269.765,94 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 15.840.297,64 juta dan tanpa migas sebesar Rp 5.185.197,11 juta.

Gambar 1.2.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas
Tahun 2011-2015

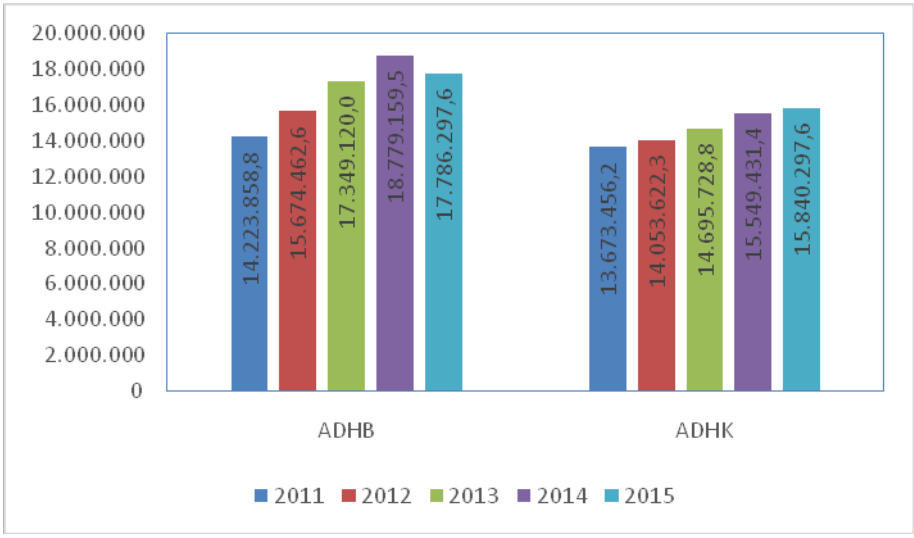

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.3.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas
Tahun 2011-2015

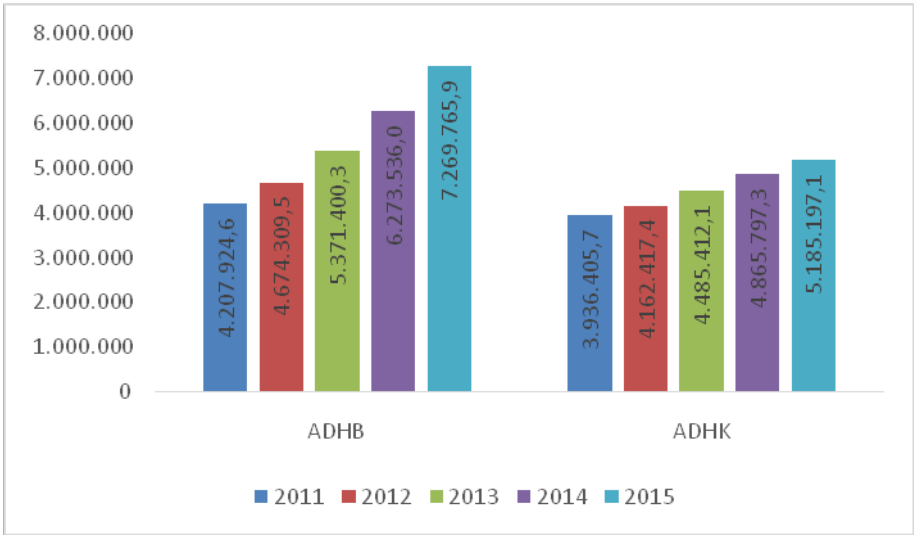

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

5. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 struktur ekonomi masih berbasis pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencatat sebesar 52,59 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,13 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 8,12 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,86 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,03 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 1.4.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015

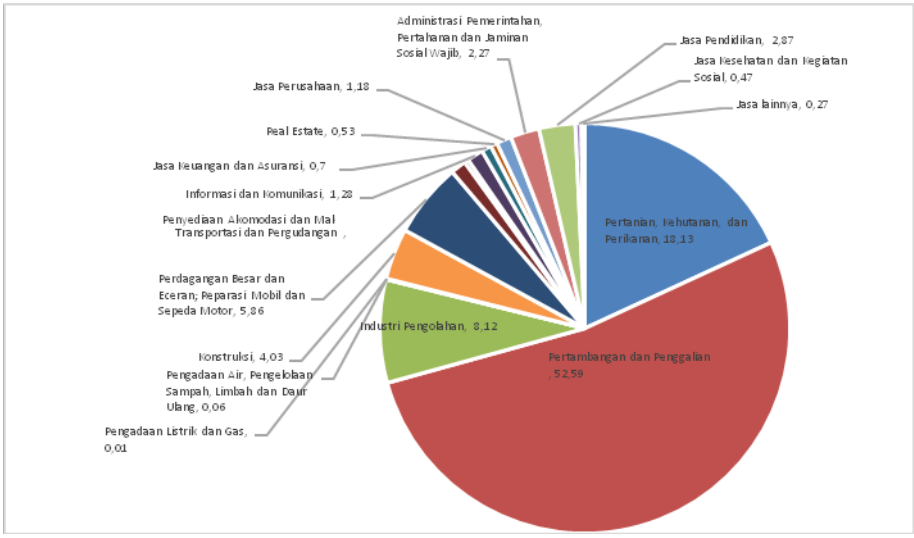

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

6. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015. PDRB Perkapita ADHB mengalami penurunan. Selanjutnya PDRB Perkapita ADHK periode 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 83.241.904 pertahun atau sebesar Rp. 6.936.825 perbulan mengalami penurunan sebesar *minus* 5,99 persen dari tahun 2014. Sementara PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2015 Rp. 74.134.402 pertahun atau Rp. 6.177.867 perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 1,87 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 1.5.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015

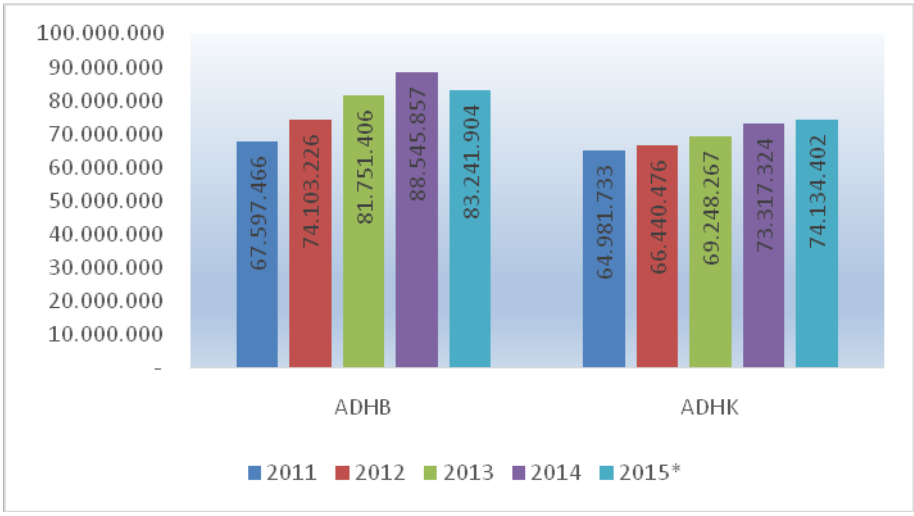

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.6.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015 (persen)

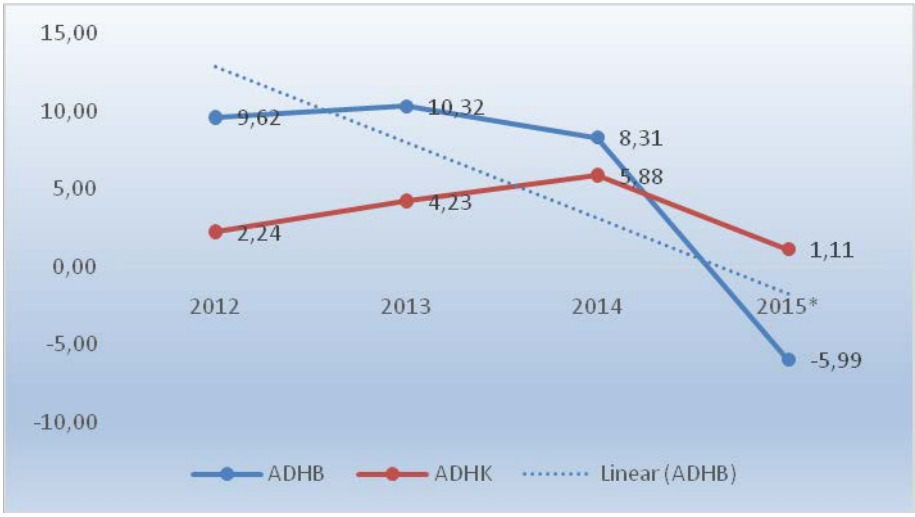

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

7. Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan. Tingkat inflasi Kota Jambi dari tahun 2010-2015 adalah

berfluktuasi dengan rata-rata 6,06 persen per tahun. Pada tahun 2010, tingkat inflasi Kota Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 10,52 persen, tetapi pada tahun 2011 tingkat inflasi menurun signifikan menjadi 2,76 persen atau menurun sebesar 73,76 persen, namun tahun 2012 inflasi naik kembali menjadi 4,22 persen atau tumbuh 52,90 persen, kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,74 persen. Selanjutnya pada tahun 2014, tingkat inflasi Kota Jambi menurun sedikit menjadi sebesar 8,72 persen dan turun signifikan kembali pada tahun 2015 menjadi 1,37 akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga.

Gambar 1.7.

Tingkat Inflasi Kota Jambi Tahun 2011-2015

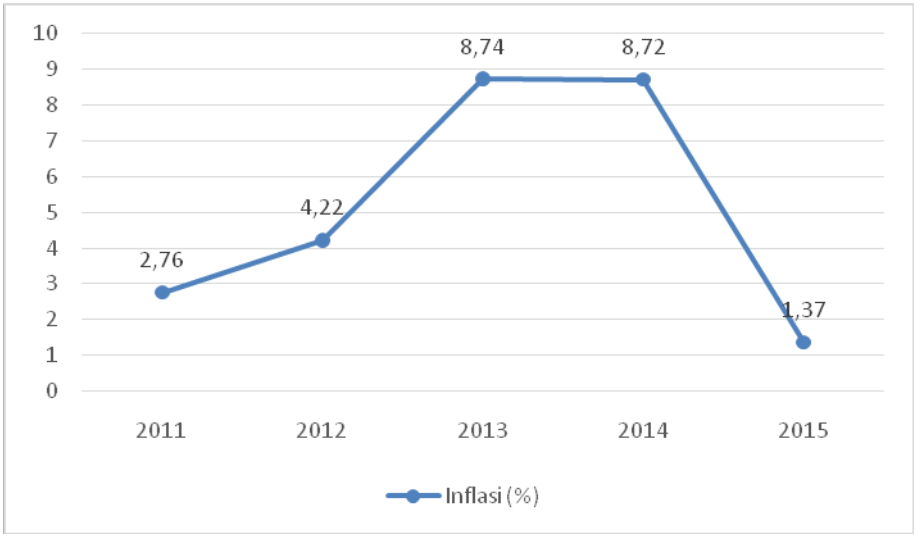

Sumber : BPS, 2016

8. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang Pluktuatif

cenderung menurun. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini pada tahun 2011 sebesar 0.28 menurun menjadi 0.27 pada tahun 2015. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak dari posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna. Grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 1.8.

Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015

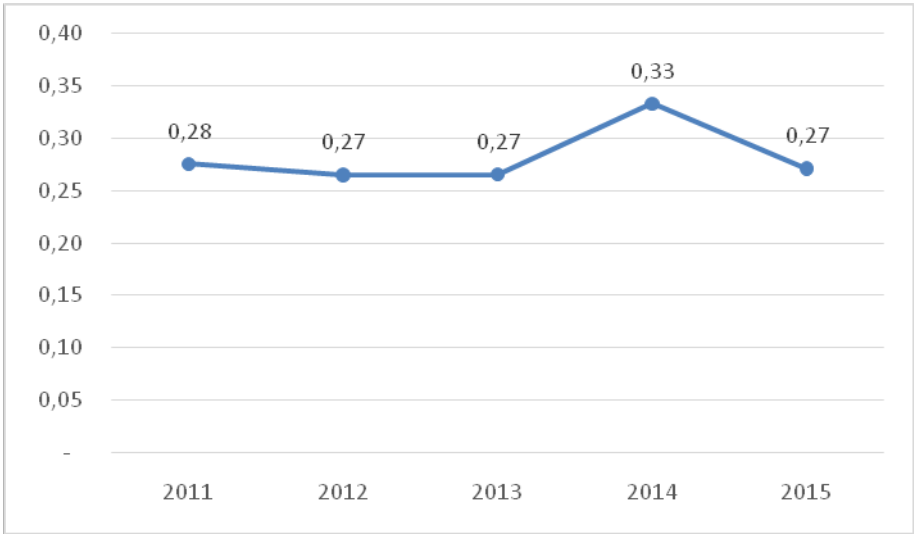

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur Kaya Fungsi*", maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip "*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*".

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang

sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat; ▪ Dinas; ▪ Badan; ▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota) ▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan : ❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi) ❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH ❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat. ❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung.	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat ▪ Lemtekda. ▪ Kecamatan (khsusus kab/kota) ❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.
MATERI	**PP No 18 Tahun 2014**	**PP No 41 Tahun 2007**
TIPOLOGI	❖ Jumlah perangkat Derah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang. ❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpkkan menjadi : ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A. ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah	❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan. ❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.

	tipe B ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	
PEMETAAN URUSAN	❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung. ❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung. ❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH	❖ Jumlah perangkat Derah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah. ❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4. ❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan. ❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan. ❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur

mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustaakan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
    3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
    4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
   2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
   3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
   4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:
   a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
   b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
   c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
   d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
   e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
   f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
   g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
   h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
   i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
   j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
   k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

a. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
b. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
c. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
d. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
e. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.
f. masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

a. Jumlah persentase Penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
b. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas.
c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petuni (NTP) masih rendah.
e. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
f. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.
g. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
h. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.

i. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
j. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah.
k. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
l. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.
b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM Tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
c. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik.
d. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
e. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.
f. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskemas pembantu belum berkualitas.
g. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.
h. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
i. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.
j. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.
k. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

a. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.
b. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
c. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.
d. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.
e. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah masih rendah.
b. Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum optimal.
c. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan.
d. Belum optimalnya peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati peraturan daerah.
f. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.
g. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena potensi belum optimal digunakan.
h. Pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
i. Masih terbatasnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.
j. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan capaian opini laporan keuangan daerah belum optimal.

D. ISSU-ISSU STRATEGIS

1. Issu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.

b) Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu diseseuaikan dengan daya dukung lingkungan.

2. Issu Strategis Perekonomian Daerah

a) Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.

b) Keberadaan UMKM dan Koperasi belum dapat berperan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat.

c) Potensi Pariwisata Daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

3. Issu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

a) Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .

c) peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.

d) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing.

4. Issu-issu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

a) Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.

b) Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik Masih rendah sehingga perlu peningkatan pendidikan politik masyarakat.

c) Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

5. Isu-issu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a) Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.

b) Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.

c) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

6. Isu-issu strategis Global, Nasional dan Regional

a) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia

c) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d) Masih terdapat konflik sengketa lahan antara Penyelesaian Batas Kabupaten dan batas Desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuakn dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021.
k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2015 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsidi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2015 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016

dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021 dan Rencana Kinerja 2016. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2016.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)"**. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

3. Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;

3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan;
4. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat;
5. Meningkatkan daya saing Produksi perikanan;
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah;
7. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara;
8. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing;
9. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas;
10. Meningkatkan sarana pendidikan dasar;
11. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;

13. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi;
15. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya;
16. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
17. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat;
18. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
19. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa;
20. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis;
21. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;
8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;
9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;

15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;
31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

a) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas;
b) Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;
c) Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
d) Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
e) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
f) peningkatan produksi tanaman padi;
g) peningkatan produksi tanaman palawija;
h) peningkatan produksi tanaman buah-buahan;
i) Peningkatan Populasi Ternak;
j) Peningkatan produksi daging;
k) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
l) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
m) Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut);
n) Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
o) Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh SKIM pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas;
p) Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing;
q) Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa;
r) Pengembangan kawasan situs cagar budaya;
s) Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
t) Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata;

u) Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
v) Peningkatan mutu pendidikan dasar;
w) Peningkatan sarana pendidikan dasar;
x) Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat;
y) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
z) Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat;
aa) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
bb) Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat;
cc) Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
dd) Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
ee) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;
ff) Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK;
gg) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;
hh) Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan;
ii) Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya;
jj) Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
kk) Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran;
ll) Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan;
mm) Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda;
nn) Peningkatan kemampuan kafilah;
oo) Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas
pp) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance);
qq) Peningkatan manejemen pemerintahan desa;

rr) Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;

ss) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;

tt) Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah :

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.

c) Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 – 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1) Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru;
2) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
3) Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung;
4) Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik;
5) Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik;
6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang;
7) Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh;
8) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
9) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi;
10) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija;
11) Mengembangkan komoditas buah-buahan;
12) Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak;
13) Meningkatkan produksi daging;
14) Meningkatkan Pendapatan Petani;
15) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan;
16) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut;
17) Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan;
18) Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat;
19) Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM;
20) Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin;

21) Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
22) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar;
23) Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya;
24) Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
25) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata;
26) Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi;
27) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
28) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
29) Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup;
30) Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas);
31) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas;
32) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama;
33) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan;
34) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
35) Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
36) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB;
37) Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak;
38) Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan;
39) Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
40) Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi;
41) Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni;

42) Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
43) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
44) Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
45) Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah;
46) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah;
47) Meningkatkan TC MTQ;
48) Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia;
49) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
50) Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
51) Melaksanakan pemilihan kepala desa;
52) Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu;
53) Meningkatkan capaian penilaian SAKIP;
54) Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah;
55) Peningkatan tindaklajut temuan;
56) Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
57) Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI I "Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan"			
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas	Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru
			Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
			Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik
			Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang
	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air
MISI II "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)"			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi	peningkatan produksi tanaman padi	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi
	Meningkatnya produksi tanaman palawija	peningkatan produksi tanaman palawija	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija
	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	peningkatan produksi tanaman buah-buahan	Mengembangkan komoditas buah-buahan
	Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Ternak	Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya produksi daging	Peningkatan produksi daging	Meningkatkan produksi daging
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Pendapatan Petani
Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan
Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut)	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut
	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan
			Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat
Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh Skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas	Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM
			Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin
		Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah
		Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Pengembangan kawasan situs cagar budaya	Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya
		Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan
		Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata
Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi,	Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Nasional dan Internasional	
MISI III "Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK"			
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Peningkatan sarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)
		Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan
		Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
		Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB
Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kemasyarakatan			
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK	Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan
		Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja
MISI IV "Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif"			
Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan	Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya	Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni
Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
			Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah
		Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda	Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah
		Peningkatan kemampuan kafilah	Meningkatkan TC MTQ
			Peningkatan kemampuan anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sholeh Indonesia
Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas
MISI V "Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis"			
Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance)	Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Peningkatan manejemen pemerintahan desa	Melaksanakan pemilihan kepala desa
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP
			Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
			Peningkatan tindaklajut temuan
			Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa
		Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.130.270.040,777,67 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 492.372.303.560,67 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 637.897.737.217,00.

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76,75%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23,43%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,79%

3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,15%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9,09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%
		Persentase kecelakaan darat	0,13%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4,10 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6,42 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8,25 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.733.404 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219.716 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.5
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%

		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33,9 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2,01%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97,09%
		APM SMP /Sederajat	84,24%
		APK SD /Sederajat	112,89%
		APK SMP /Sederajat	92,28%
		Angka Melek Huruf	97,32%
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th
		Harapan Lama Sekolah	11,30 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89,23%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96,63%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65,45 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,00/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22,87/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,76%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76,5%

		Prevalensi Penyakit Kusta	3,5 /1000
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20,0%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11,76%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%
		Indeks Pembangunan Gender	59,81
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88,85
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%

5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47,95%
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30.000
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk

indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2016 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

	MISI 1 : *MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*

Untuk mencapai Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 5 (lima) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
2) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan.
3) Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten.
4) Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk.
5) Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76,75%	85,27%	111,10
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23,43%	23,43%	100

	konektivitas				
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,79%	61,55%	92,15
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	100
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,15%	5,15%	100
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9,09%	9,09%	100
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%	40%	100
		Persentase kecelakaan darat	0,13%	0,13%	100
		Persentase kecelakaan air	0%	0%	100

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5 sasaran yang didukung dengan 9 Indikator Kinerja Utama.

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 sebesar 100,36 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarakan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini.

	MISI 2 : ***MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)***

Untuk mencapai Misi 1 ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Investasi Industri, Kepariwisataan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim)"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 11 (sebelas) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya produksi tanaman padi.
2) Meningkatnya produksi tanaman palawija.
3) Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan.
4) Meningkatnya Populasi Ternak.
5) Meningkatnya produksi daging.
6) Meningkatnya pendapatan petani.
7) Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat.
8) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.
9) Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan.
10) Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM serta Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing.
11) Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4,10 Ton/Ha	4,56 Ton/Ha	111,22
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6,42 Ton/Ha	9,54 Ton/Ha	148,60
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8,25 Ton/Ha	20,9 Ton/Ha	253,33
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.733.404 ekor	3.833.404 ekor	102,68
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219.716 Kg	219.916 Kg	100,09
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97,55	98,6	101,08
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,5%	93,0%	115,53
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn	nn	100,00
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)	1.800 (Kkal/Kap/Hari)	100,00
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%	0%	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%	0%	100,00
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%	0%	100,00
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33,9 Kg/Kapita	35,0 Kg/Kapita	103,24
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM	608 IKM	100,00
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2,01%	3%	149,15
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	100,00

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 11 sasaran dan 16 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 sebesar 117,81 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan

maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100%.

	MISI 3 : ***MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK***

Untuk mencapai Misi 3 ***"Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan Iptek"*** pada tahun 2016 telah dilaksanakan 7 (sebelas) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2) Meningkatnya sarana pendidikan dasar.
3) Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
4) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
5) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah.
6) Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.
7) Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97,09%	97,09%	100,00
		APM SMP /Sederajat	84,24%	84,24%	100,00

		APK SD /Sederajat	112,89%	112,89%	100,00
		APK SMP /Sederajat	92,28%	92,28%	100,00
		Angka Melek Huruf	97,32%	97,32%	100,00
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th	6 Th	100,00
		Harapan Lama Sekolah	11,30 Th	11,30 Th	100,00
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89,23%	89,23%	100,00
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96,63%	96,63%	100,00
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65,45 Th	65,43 Th	99,97
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,00/1.000 KH	21,00/1.000 KH	95,45
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22,87/1.000 KH	21,55/1.000 KH	94,23
		Jumlah Kematian Ibu	5	8	62,5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,76%	0,46%	165,22
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76,5%	76,5%	100,00
		Prevalensi Penyakit Kusta	3,5 /1000	3,0 /1000	85,71
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7	6	85,71
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%	28%	78,66
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20,0%	26,0%	130,00
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11,76%	11,76%	100,00
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78%	0,78%	100,00

6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%	35%	100,00
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%	35%	100,00
		Indeks Pembangunan Gender	59,81	59,81	100,00
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%	70%	100,00
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%	75%	100,00

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 7 sasaran dan 26 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2016 hampir sempurna sebesar 100 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 99,90 % atau hampir mencapai 100 % meskipun pada indikator jumlah kematian ibu masih tinggi sehingga realiasi dari target tahun 2016 hanya sebesar 62,5 % namun secara rata-rata tetap masuk dalam katergori baik.

MISI 4 : *MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF*

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

1) Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat.
2) Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat.
3) Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
4) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran.

5) Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat.
6) Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88,85	88,85	100,00
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-	-	100,00
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%	72%	100,00
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%	80%	100,00
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4	4	100,00
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%	70%	100,00

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 6 sasaran dengan 6 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2016 maraih angka sebesar 100 %.

MISI 5 : ***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS***

Untuk mencapai Misi 5 ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis"*** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

1) Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik.
2) Meningkatnya manajemen pemerintahan desa.
3) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100,00
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47,95%	47,95%	100,00

3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30.000	30.000	100,00
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B	B	100,00
		Opini BPK	WDP	WDP	100,00
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%	92%	100,00
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi	Tinggi	100,00
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%	74%	122,97

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal capaian kinerja tahun 2016 pada Misi 5 mencapai 102,87 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangakan rata-rata capaian kinerja misi kelima tahun 2016 sebesar 102,87 % dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 122,97 % pada Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD.

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.130.270.040.777,67 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 atau terealisasi sebesar 94,15 %, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	39.167.861.222,26	43.935.738.483,85	112,17

2	Pendapatan Dana Perimbangan	946.571.991.750,00	968.373.794.264,00	102,30
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	85.364.344.823,25	78.961.797.201,00	92,50
	Total	**1.071.104.197.795,51**	**1.091.271.329.948,85**	**101,88**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	12.759.204.791,61	12.399.377.006,85	97,18
2	Retribusi Daerah	6.398.921.758,00	4.368.648.180,25	68,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	4.800.000.000,00	4.960.217.704,08	103,34
4	Lain – Lain PAD yang sah	15.209.734.672,65	22.207.495.592,67	146,01
Jumlah		**1.071.104.197.795,51**	**1.091.271.329.948,85**	**101,88**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 penerimaan yang ditargetkan sebesar 1.071.104.197.795,51 melebihi target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh seluruh pendapatan sebesar sebesar 1.091.271.329.948,85 atau 101,88 %. realisasi pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	117.920.891.750,00	169.194.985.646,00	143,48
2	Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	533.829.506.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	294.821.594.000,00	265.349.302.618,00	90,00
Jumlah		**946.571.991.750,00**	**968.373.794.264,00**	**102,30**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2016 mencapai target pendapatan yang ditetapkan sebesar 946.571.991.750,00. Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi 968.373.794.264,00 atau 102,30%

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	0,00	577.353.500,00	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	36.286.508.706,00	30.086.019.701,00	82,91
3	Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus (DPDF)	49.077.836.117,25	48.298.424.000,00	98,41
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah	0,00	0,00	-

	daerah lainnya			
J u m l a h		**85.364.344823.25**	**85.364.344823.25**	**100,00**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	492.372.303.560,67	465.192.065.689,00	94,48
2	Belanja Langsung	637.897.737.217,00	598.912.818.124,00	93,89
	Total	**1.130.270.040.777,67**	**1.064.104.883.813,00**	**94,15**

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2016 belanja tidak langsung hanya sebesar 94,48 % dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2016-2021 bahwa belanja tidak langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total realisasi belanja sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.130.270.040.777,67 atau terealisasi sebesar 94,15 %, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 465.192.065.689,00 atau 94,48 % dan belanja langsung sebesar Rp. 598.912.818.124,00 atau 93,89 %.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**61.665.842.982,16**	**61.665.842.982,16**
	- SiLPA	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
	- Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	0,00
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00
	- Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3	**Pembiayaan Netto**	**59.165.842.982,16**	**59.665.842.982,16**

** Data Sementara(unaudit)*
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2016, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 61.665.842.982,16 terealisasi sebesar Rp. 61.665.842.982,16 atau 100 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 100% sehingga pembiayaan netto tahun 2016 sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 59.165.842.982,16 terealisasi sebesar Rp. 59.665.842.982,16 atau 100,85 %.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2016 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H. ROMI HARIYANTO, SE.

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76.75%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23.43%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66.79%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.15%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%
		Persentase kecelakaan darat	0.13%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.10 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.42 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8.25 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,733,404 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219,716 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.5
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80.5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33.9 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.01%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.09%
		APM SMP /Sederajat	84.24%
		APK SD /Sederajat	112.89%
		APK SMP /Sederajat	92.28%
		Angka Melek Huruf	97.32%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th
		Harapan Lama Sekolah	11.30 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.23%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96.63%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.45 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.87/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.76%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76.5%
		Prevalensi Penyakit Kusta	3.5 /1000
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20.0%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11.76%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%
		Indeks Pembangunan Gender	59.81
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88.85
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47.95%
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30,000
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016

Jumlah APBDP Tahun 2016 sebesar Rp. 1.130.270.040,777,67 yang terdiri dari :
Belanja Tidak Lansung sebesar Rp/ 492.372.303.560,67 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 637.897.737.217,00

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	78.64%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	26.29%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.03%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.13%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	43%
		Persentase kecelakaan darat	0.12%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.15 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.8 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	9 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,911,670 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	230,179 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	98.8
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81.5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78.3%
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,840 (Kkal/Kap/Hari)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	56.17%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0.3%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0.33%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	34.4 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	750 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.0%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 4
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.10%
		APM SMP /Sederajat	84.25%
		APK SD /Sederajat	112.92%
		APK SMP /Sederajat	92.29%
		Angka Melek Huruf	97.35%
		Angka rata-rata lama sekolah	7 Th
		Harapan Lama Sekolah	11.32 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.24%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	97.37%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.50 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21.50/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.66%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	77%
		Prevalensi Penyakit Kusta	3 /1000
		Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	38%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	21.5%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	29.41%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	50%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50%
		Indeks Pembangunan Gender	60.56
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	75%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	70%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	91.75
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	1
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	74%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	85%
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	1
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	75%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	61.64%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	31,500
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	94%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	79%

Jumlah APBDP Tahun 2017 sebesar Rp. ……. yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp……. dan Belanja Langsung sebesar Rp. …….

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76.75%	85.27%	111.10
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23.43%	23.43%	100
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66.79%	61.55%	92.15
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	100
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.15%	5.15%	100
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%	9.09%	100
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%	40%	100
		Persentase kecelakaan darat	0.13%	0.13%	100
		Persentase kecelakaan air	0%	0%	100
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)					
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.10 Ton/Ha	4.56 Ton/Ha	111.22
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.42 Ton/Ha	9.54 Ton/Ha	148.60
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8.25 Ton/Ha	20,9 Ton/Ha	253.33
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,733,404 ekor	3,833,404 ekor	102.68
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219,716 Kg	219,916 Kg	100.09

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.55	98.6	101.08
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80.5%	93.0%	115.53
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn	nn	100.00
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	100.00
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%	0%	100.00
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%	0%	100.00
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%	0%	100.00
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33.9 Kg/Kapita	35.0 Kg/Kapita	103.24
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM	608 IKM	100.00
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.01%	3%	149.15
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	100.00
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK					
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.09%	97.09%	100.00
		APM SMP /Sederajat	84.24%	84.24%	100.00
		APK SD /Sederajat	112.89%	112.89%	100.00
		APK SMP /Sederajat	92.28%	92.28%	100.00
		Angka Melek Huruf	97.32%	97.32%	100.00
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th	6 Th	100.00
		Harapan Lama Sekolah	11.30 Th	11.30 Th	100.00
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.23%	89.23%	100.00
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96.63%	96.63%	100.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.45 Th	65.43 Th	99.97
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH	21.00/1.000 KH	95.45
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.87/1.000 KH	21.55/1.000 KH	94.23
		Jumlah Kematian Ibu	5	8	62.5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.76%	0.46%	165.22
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76.5%	76.5%	100.00
		Prevalensi Penyakit Kusta	3.5 /1000	3.0 /1000	85.71
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7	6	85.71
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%	28%	78.66
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20.0%	26.0%	130.00
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11.76%	11.76%	100.00
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%	0.78%	100.00
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%	35%	100.00
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%	35%	100.00
		Indeks Pembangunan Gender	59.81	59.81	100.00
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%	70%	100.00
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%	75%	100.00
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF					
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88.85	88.85	100.00
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-	-	100.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%	72%	100.00
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%	80%	100.00
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4	4	100.00
					100.00
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS					
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100.00
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47.95%	47.95%	100.00
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30,000	30,000	100.00
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B	CC	100.00
		Opini BPK	WDP	WDP	100.00
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%	92%	100.00
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi	Tinggi	100.00
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%	91%	122.97

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76.75%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23.43%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66.79%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.15%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%
		Persentase kecelakaan darat	0.13%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.10 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.42 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8.25 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,733,404 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219,716 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.5
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80.5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33.9 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.01%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
		APM SD /Sederajat	97.09%
		APM SMP /Sederajat	84.24%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APK SD /Sederajat	112.89%
		APK SMP /Sederajat	92.28%
		Angka Melek Huruf	97.32%
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th
		Harapan Lama Sekolah	11.30 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.23%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96.63%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.45 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.87/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.76%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76.5%
		Prevalensi Penyakit Kusta	3.5 /1000
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20.0%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11.76%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%
		Indeks Pembangunan Gender	59.81
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88.85
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47.95%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30,000
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%

Jumlah APBDP Tahun 2016 sebesar Rp. 1.130.270.040,777,67 yang terdiri dari :
Belanja Tidak Lansung sebesar Rp/ 492.372.303.560,67 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 637.897.737.217,00

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	78.64%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	26.29%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.03%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.13%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	43%
		Persentase kecelakaan darat	0.12%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.15 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.8 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	9 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,911,670 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	230,179 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	98.8
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81.5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78.3%
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,840 (Kkal/Kap/Hari)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	56.17%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0.3%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0.33%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	34.4 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	750 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.0%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 4
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.10%
		APM SMP /Sederajat	84.25%
		APK SD /Sederajat	112.92%
		APK SMP /Sederajat	92.29%
		Angka Melek Huruf	97.35%
		Angka rata-rata lama sekolah	7 Th
		Harapan Lama Sekolah	11.32 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.24%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	97.37%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.50 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21.50/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.66%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	77%
		Prevalensi Penyakit Kusta	3 /1000
		Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	38%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	21.5%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	29.41%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	50%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50%
		Indeks Pembangunan Gender	60.56
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	75%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	70%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	91.75
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	1
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	74%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	85%
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	1
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	75%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	61.64%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	31,500
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	94%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	79%

Jumlah APBDP Tahun 2017 sebesar Rp. ……. yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp……. dan Belanja Langsung sebesar Rp. …….

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	76.75%	85.27%	111.10
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	23.43%	23.43%	100
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66.79%	61.55%	92.15
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	100
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.15%	5.15%	100
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%	9.09%	100
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	40%	40%	100
		Persentase kecelakaan darat	0.13%	0.13%	100
		Persentase kecelakaan air	0%	0%	100
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)					
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.10 Ton/Ha	4.56 Ton/Ha	111.22
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.42 Ton/Ha	9.54 Ton/Ha	148.60
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	8.25 Ton/Ha	20,9 Ton/Ha	253.33
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,733,404 ekor	3,833,404 ekor	102.68
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	219,716 Kg	219,916 Kg	100.09

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	97.55	98.6	101.08
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80.5%	93.0%	115.53
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nn	nn	100.00
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	100.00
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0%	0%	100.00
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0%	0%	100.00
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0%	0%	100.00
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	33.9 Kg/Kapita	35.0 Kg/Kapita	103.24
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	608 IKM	608 IKM	100.00
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.01%	3%	149.15
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	100.00
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK					
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.09%	97.09%	100.00
		APM SMP /Sederajat	84.24%	84.24%	100.00
		APK SD /Sederajat	112.89%	112.89%	100.00
		APK SMP /Sederajat	92.28%	92.28%	100.00
		Angka Melek Huruf	97.32%	97.32%	100.00
		Angka rata-rata lama sekolah	6 Th	6 Th	100.00
		Harapan Lama Sekolah	11.30 Th	11.30 Th	100.00
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.23%	89.23%	100.00
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	96.63%	96.63%	100.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.45 Th	65.43 Th	99.97
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH	21.00/1.000 KH	95.45
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.87/1.000 KH	21.55/1.000 KH	94.23
		Jumlah Kematian Ibu	5	8	62.5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.76%	0.46%	165.22
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	76.5%	76.5%	100.00
		Prevalensi Penyakit Kusta	3.5 /1000	3.0 /1000	85.71
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7	6	85.71
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	35%	28%	78.66
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	20.0%	26.0%	130.00
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	11.76%	11.76%	100.00
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%	0.78%	100.00
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	35%	35%	100.00
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35%	35%	100.00
		Indeks Pembangunan Gender	59.81	59.81	100.00
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	70%	70%	100.00
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	75%	75%	100.00
NO.	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET 2016**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016**
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF					
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	88.85	88.85	100.00
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-	-	100.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	72%	72%	100.00
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	80%	80%	100.00
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	4	4	100.00
					100.00
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2016
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS					
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100.00
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	47.95%	47.95%	100.00
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	30,000	30,000	100.00
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B	CC	100.00
		Opini BPK	WDP	WDP	100.00
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	92%	92%	100.00
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi	Tinggi	100.00
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	74%	91%	122.97

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	78.64%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	26.29%
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.03%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	100%
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.13%
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	43%
		Persentase kecelakaan darat	0.12%
		Persentase kecelakaan air	0%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	4.15 Ton/Ha
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	6.8 Ton/Ha
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	9 Ton/Ha
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3,911,670 ekor
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	230,179 Kg
6.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	98.8
7.	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81.5%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78.3%
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	1,840 (Kkal/Kap/Hari)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	56.17%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	0.3%
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0.33%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	34.4 Kg/Kapita
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	750 IKM
	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	2.0%
11.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	peringkat 4
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	97.10%
		APM SMP /Sederajat	84.25%
		APK SD /Sederajat	112.92%
		APK SMP /Sederajat	92.29%
		Angka Melek Huruf	97.35%
		Angka rata-rata lama sekolah	7 Th
		Harapan Lama Sekolah	11.32 Th
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	89.24%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	97.37%
3.	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65.50 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21.50/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22.00/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	5
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0.66%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	77%
		Prevalensi Penyakit Kusta	3 /1000
		Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	38%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	21.5%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	29.41%
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.78%
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	50%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50%
		Indeks Pembangunan Gender	60.56
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	75%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	70%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	91.75
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	1
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	74%
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	85%
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	1
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	75%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	61.64%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	31,500
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	94%
		Predikat Nilai EPPD	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	79%

Jumlah APBDP Tahun 2017 sebesar Rp. ……. yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp……. dan Belanja Langsung sebesar Rp. …….

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja				
				Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)								
Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan								
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Baik : Jumlah Panjang jalan X 100	74.43%	76.75%	78.64%	80.07%	81.42%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik (beton) : Jumlah Jembatan X 100	20.40%	23.43%	26.29%	29.58%	32.85%
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan irigasi yang baik terhadap irigasi yang ada	62.61%	66.79%	71.03%	74.45%	77.42%
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Realisasi RTRW : Rencana Peruntukan x 100	100%	100%	100%	100%	100%
	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	Luas Area Pemukiman tertata : Luas Area Pemukiman Keseluruhan x 100	5.16%	5.15%	5.13%	5.11%	5.09%
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	Jumlah terminal type C yang ada : jumlah terminal x 100	18.18%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	Jumlah Dermaga dalam kondisi baik (beton) : Jumlah Dermaga x 100	35%	40%	43%	45%	47%
		Persentase kecelakaan darat	cukup jelas	0.13%	0.13%	0.12%	0.11%	0.11%
		Persentase kecelakaan air	cukup jelas	3%	0%	0%	0%	0%
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat n								
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	cukup jelas	4.09 Ton/Ha	4.10 Ton/Ha	4.15 Ton/Ha	4.20 Ton/Ha	4.28 Ton/Ha
	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	cukup jelas	5.42 Ton/Ha	6.42 Ton/Ha	6.8 Ton/Ha	7 Ton/Ha	7.2 Ton/Ha
	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	cukup jelas	7.5 Ton/Ha	8.25 Ton/Ha	9 Ton/Ha	10 Ton/Ha	11 Ton/Ha
	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	cukup jelas	3,555,138 ekor	3,733,404 ekor	3,911,670 ekor	4,089,936 ekor	4,268,202 ekor
	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	cukup jelas	209,253 Kg	219,716 Kg	230,179 Kg	240,642 Kg	251,105 Kg
	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	indeks yang diterima (It) petani : indeks yang dibayar (Ib) petani x 100	nn	97.5	98.8	99.3	100
Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Rata rata Jumlah Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) : Jumlah Penduduk x 100	79.8%	80.5%	81.5%	83%	85%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Rata rata Jumlah Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) : Jumlah Penduduk x 100	nn	nn	78.3%	79.8%	81%
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	cukup jelas	1,768 (Kkal/Kap/Hari)	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	1,840 (Kkal/Kap/Hari)	1,880 (Kkal/Kap/Hari)	1,920 (Kkal/Kap/Hari)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja				
				Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun berkenaan - jumlah produksi perikanan Budidayatahun sebelumnya : jumlah produksi perikanan Budidaya tahun sebelumnya x 100	-67.44%	0%	56.17%	2.04%	3.25%
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap tahun berkenaan - jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya : jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya x 100	3.3%	0%	0.3%	0.4%	3.6%
	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun berkenaan - jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun sebelumnya : jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun sebelumnya x 100	124.10%	0%	0.33%	0.47%	0.48%
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	Jumlah Konsumsi ikan (kg) : Target daerah x 100	33.9 Kg/Kapita	33.9 Kg/Kapita	34.4 Kg/Kapita	34.9 Kg/Kapita	35.4 Kg/Kapita
Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	cukup jelas	553 IKM	608 IKM	750 IKM	1,000 IKM	1,300 IKM
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan : Target daerah x 100	-2.91%	2.01%	2.0%	1.96%	1.94%
Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	cukup jelas	peringkat 5	peringkat 5	peringkat 4	peringkat 4	peringkat 3
Misi III : Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK								
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	97.08%	97.09%	97.10%	97.11%	97.12%
		APM SMP /Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	84.23%	84.24%	84.25%	84.26%	84.27%
		APK SD /Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/sederajat	112.87%	112.89%	112.92%	112.95%	112.97%
		APK SMP /Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/sederajat	92.27%	92.28%	92.29%	92.31%	92.32%
		Angka Melek Huruf	Persentase jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang	97.30%	97.32%	97.35%	97.38%	97.40%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja				
				Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019
		Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	6 Th	6 Th	7 Th	7 Th	7 Th
		Harapan Lama Sekolah	cukup jelas	11.28 Th	11.30 Th	11.32 Th	11.34 Th	11.36 Th
Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	cukup jelas	89.22%	89.23%	89.24%	89.25%	89.27%
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	cukup jelas	95.56%	96.63%	97.37%	98.11%	98.85%
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Cukup Jelas	65.43 Th	65.45 Th	65.50 Th	65.55 Th	65.60 Th
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	cukup jelas	22.35/1.000 KH	22.00/1.000 KH	21.50/1.000 KH	21.00/1.000 KH	20.50/1.000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	cukup jelas	22.87/1.000 KH	22.87/1.000 KH	22.00/1.000 KH	21.50/1.000 KH	21.00/1.000 KH
		Jumlah Kematian Ibu	cukup jelas	5	5	5	5	4
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	cukup jelas	0.76%	0.76%	0.66%	0.56%	0.46%
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	cukup jelas	76%	76.5%	77%	80%	82%
		Prevalensi Penyakit Kusta	cukup jelas	3.7 /1000	3.5 /1000	3 /1000	2.5 /1000	2 /1000
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Cukup Jelas	6	7	7	9	11
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	31.2%	35%	38%	40%	43%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18.5%	20.0%	21.5%	23%	23.5%
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	Cukup Jelas	-	11.76%	29.41%	47%	64.7%
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase laju pertumbuhan penduduk per tahun	0.94%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	jumlah perempuan yang mendapatkan keterampilan dan usaha ekonomi : target daerah x 100	30%	35%	50%	60%	70%
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Cukup jelas	30%	35%	50%	60%	70%
		Indeks Pembangunan Gender	cukup jelas	59.06	59.81	60.56	61.31	62.06
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	Jumlah Desa/Kelurahan terkoneksi jaringan internet : jumlah Desa/Kelurahan x 100	68%	70%	75%	80%	85%
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	Jumlah tenaga kerja yang megikuti diklat : jumlah tenaga kerja x 100	N	75%	70%	75%	80%
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif								

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja				
				Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	Cukup Jelas	87.66	88.85	91.75	93.85	96.62
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	Cukup Jelas	-	-	1	1	1
Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	Cukup Jelas	71%	72%	74%	76%	80%
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	Jumlah kebakaran yang di tangani : jumlah kebakaran yang ada x 100	n	80%	85%	90%	92%
Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	Cukup Jelas	5	4	1	2	2
Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	Jumlah sengketa lahan yang di selesaikan : jumlah sengketa lahan x 100	70%	70%	75%	80%	85%
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis								
Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup Jelas	B	B	B	B	B
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Jumlah Desa yang dibina : jumlah desa x 100	27.4%	47.95%	61.64%	75.34%	82.19%
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Cukup Jelas	47,123	30,000	31,500	33,075	34,729
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	Cukup Jelas	CC	B	B	B	B
		Opini BPK	Cukup Jelas	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	Cukup Jelas	72%	92%	94%	95%	96%
		Predikat Nilai EPPD	Cukup Jelas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	Cukup Jelas	74%	74%	79%	84%	89%

2020	Kondisi Akhir 2021
82.68%	83.87%
36.45%	38.78%
79.86%	81.57%
100%	100%
5.07%	5.06%
-	54.55%
49%	52%
0.10%	0.10%
0%	3%
elayan (maritim)	
4.29 Ton/Ha	4.30 Ton/Ha
7.4 Ton/Ha	7.6 Ton/Ha
12 Ton/Ha	12 Ton/Ha
4,446,468 ekor	4,624,734 ekor
261,568 Kg	272,031 Kg
101.3	101.4
87%	89%
83%	85%
1,960 (Kkal/Kap/Hari)	2,000 (Kkal/Kap/Hari)

2020	Kondisi Akhir 2021
1.99%	2.01%
-2.4%	0.7%
0.49%	0.38%
35.9 Kg/Kapita	36.4 Kg/Kapita
1,600 IKM	2,000 IKM
1.91%	1.90%
peringkat 3	peringkat 2
97.13%	97.14%
84.28%	84.29%
112.99%	113.01%
92.34%	92.36%
97.43%	97.45%

2020	Kondisi Akhir 2021
7 Th	7 Th
11.38 Th	11.40 Th
89.28%	89.30%
99.59%	100.00%
65.65 Th	65.70 Th
20.00/1.000 KH	19/1.000 KH
20.50/1.000 KH	20/1.000 KH
4	4
0.36%	0.25%
84%	85%
1.5 /1000	1 /1000
13	14
46%	50%
24%	25%
70.58%	76.5%
0.78%	0.77%
75%	85%
75%	85%
62.81	63.56
90%	99%
85%	90%

2020	**Kondisi Akhir 2021**
97.85	97.85
2	5
82%	84%
95%	100%
1	1
90%	90%
A	A
89.04%	100%
36,465	38,288
B	BB
WTP	WTP
97%	97%
Tinggi	Tinggi
94%	100%

Lampiran : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor : 45 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)						
Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan						
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Baik : Jumlah Panjang jalan X 100	76.75%	Primer	Dinas PUPR
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik (beton) : Jumlah Jembatan X 100	23.43%	Primer	Dinas PUPR
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan irigasi yang baik terhadap irigasi yang ada	66.79%	Primer	Dinas PUPR
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Realisasi RTRW : Rencana Peruntukan x 100	100%	Primer	Dinas PUPR
	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	Luas Area Pemukiman tertata : Luas Area Pemukiman Keseluruhan x 100	5.15%	Primer	Dinas Perumahan dan Permukiman
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	Jumlah terminal type C yang ada : jumlah terminal x 100	9.09%	Sekunder	Dinas Perhubungan
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	Jumlah Dermaga dalam kondisi baik (beton) : Jumlah Dermaga x 100	40%	Sekunder	Dinas Perhubungan
		Persentase kecelakaan darat	Jumlah Kecelakaan darat : Jumlah Pengguna Transportasi darat x 100	0.13%	Sekunder	Dinas Perhubungan
		Persentase kecelakaan air	Jumlah Kecelakaan Air : Jumlah Pengguna Transportasi Air x 100	0%	Sekunder	Dinas Perhubungan
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)						
	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	cukup jelas	4.10 Ton/Ha	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman jagung (ton/Ha)	cukup jelas	6.42 Ton/Ha	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman semangka (ton/Ha)	cukup jelas	8.25 Ton/Ha	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	cukup jelas	3,733,404 ekor	Primer	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	cukup jelas	219,716 Kg	Primer	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	indeks yang diterima (It) petani : indeks yang dibayar (Ib) petani x 100	97.5	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura & Dinas Perikanan & Dinas Perkebunan dan Peternakan & Dinas Ketahanan Panan
Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Rata rata Jumlah Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) : Jumlah Penduduk x 100	80.5%	Primer	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Rata rata Jumlah Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) : Jumlah Penduduk x 100	nn	Primer	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	cukup jelas	1,800 (Kkal/Kap/Hari)	Skunder	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun berkenaan - jumlah produksi perikanan Budidayatahun sebelumnya : jumlah produksi perikanan Budidaya tahun sebelumnya x 100	0%	Primer	Dinas Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap tahun berkenaan - jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya : jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya x 100	0%	Primer	Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun berkenaan - jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun sebelumnya : jumlah Produksi Olahan hasil perikanan tahun sebelumnya x 100	0%	Primer	Dinas Perikanan
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	Jumlah Konsumsi ikan (kg) : Target daerah x 100	33.9 Kg/Kapita	Primer	Dinas Perikanan
Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau	Jumlah IKM yang produktif	cukup jelas	608 IKM	Primer	Dinas Perindag
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan : Target daerah x 100	2.01%	Primer	Dinas Parbudpora
Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	cukup jelas	peringkat 5	Primer	Dinas Parbudpora
Misi III : Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK						
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	97.09%	Primer	Dinas Pendidikan
		APM SMP /Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	84.24%	Primer	Dinas Pendidikan
		APK SD /Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/sederajat	112.89%	Primer	Dinas Pendidikan
		APK SMP /Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/sederajat	92.28%	Primer	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
		Angka Melek Huruf	Persentase jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa menulis terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	97.32%	Primer	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	6 Th	Primer	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	cukup jelas	11.30 Th	Primer	Dinas Pendidikan
Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	cukup jelas	89.23%	Primer	Dinas Pendidikan
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	cukup jelas	96.63%	Primer	Dinas Pendidikan
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Cukup Jelas	65.45 Th	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	cukup jelas	22.00/1.000 KH	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	cukup jelas	22.87/1.000 KH	Primer	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu	cukup jelas	5	Primer	Dinas Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	cukup jelas	0.76%	Primer	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	cukup jelas	76.5%	Primer	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Penyakit Kusta	cukup jelas	3.5 /1000	Primer	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Cukup Jelas	7	Primer	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	35%	Skunder	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20.0%	Skunder	RSU Nurdin
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	Cukup Jelas	11.76%	Primer	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase laju pertumbuhan penduduk per tahun	0.78%	Skunder	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	jumlah perempuan yang mendapatkan keterampilan dan usaha ekonomi : target daerah x 100	35%	Skunder	Dinas Sosial dan P3A
		Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Cukup jelas	35%	Primer	Dinas Sosial dan P3A
		Indeks Pembangunan Gender	cukup jelas	59.81	Primer	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	Jumlah Desa/Kelurahan terkoneksi jaringan internet : jumlah Desa/Kelurahan x 100	70%	Skunder	Dinas Kominfo
		Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	Jumlah tenaga kerja yang megikuti diklat : jumlah tenaga kerja x 100	75%	Skunder	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif						
Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	Cukup Jelas	88.85	Primer	Kesbangpol
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	Cukup Jelas	-	Primer	Kesbangpol
Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	Cukup Jelas	72%	Primer	Kesbangpol
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	Jumlah kebakaran yang di tangani : jumlah kebakaran yang ada x 100	80%	Skunder	Satpol PP dan Damkar
Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	Cukup Jelas	4	Primer	Setda
Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	Jumlah sengketa lahan yang di selesaikan : jumlah sengketa lahan x 100	70%	Skunder	Setda
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis						

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Kinerja 2016	Sumber Data	SKPD Penanggungjawab
Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup Jelas	B	Primer	Setda
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Jumlah Desa yang dibina : jumlah desa x 100	47.95%	Skunder	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Cukup Jelas	30,000	Primer	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	Cukup Jelas	B	Primer	Inspektorat
		Opini BPK	Cukup Jelas	WDP	Primer	WDP
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	Cukup Jelas	92%	Primer	Badan Keuangan Daerah & Inspektorat
		Predikat Nilai EPPD	Cukup Jelas	Tinggi	Primer	Setda
		Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	Cukup Jelas	74%	Primer	Bappeda